

PERJANJIAN KINERJA ESELON III



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : S U W I T O, SE
Jabatan : Sekretaris BKAD Provsu
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
Jabatan : Kepala BKAD Provsu
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Pihak Kesatu
SEKRETARIS

S U W I T O, SE
PEMBINA
NIP. 19720319 199602 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Keuangan	1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 40.968.647.186,00

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Medan,
SEKRETARIS



SUWITO, SE
PEMBINA
NIP. 19720319 199602 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN: 2023
KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syafei, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Medan,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH

AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH II
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

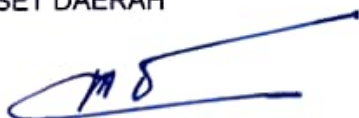
No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 3 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu dan sesuai ketentuan	2 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Berita Acara Review RKA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Berita Acara Review DPA-SKPD	33 Dokumen – 1 Bulan
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	33 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Dokumen – 2 Bulan
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Dokumen – 5 Bulan
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 Kali
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya dana bagi hasil provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 4 Triwulan
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya bantuan keuangan provinsi sumatera utara kepada kab/kota	33 Dokumen – 1 Tahun

3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tepat Waktu	1 Tahun
	- Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya data bidang keuangan daerah yang akurat	1 Dokumen – 4 Bulan
	- Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya proses pengelolaan data APBD pada Aplikasi SIPD	1 Kegiatan – 12 Bulan

<u>Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	423.094.500,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	421.519.125,00
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	145.684.000,00
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	307.635.025,00
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	139.628.000,00
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	298.977.896,00
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.424.989.125,00
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.000.981.475,00
9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	40.427.200,00
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	169.185.625,00
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	41.092.500,00
12. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.704.620.303.373,00
13. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	342.217.725.500,00
14. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	271.746.100,00
15. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.302.966.575,00
Jumlah	3.053.825.956.019,00

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Medan,

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH



AHMAD SYAFEI, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 19721201 200701 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID PERBENDAHARAAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Halimatussa'adiyah, SE, M.AP
Jabatan : Kabid Perbendaharaan Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

**Pihak Kedua,
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001**

**Pihak Pertama,
KABID PERBENDAHARAAN DAERAH**

**HALIMATHUSSA'ADIAH, SE, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660501 199007 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID PERBENDAHARAAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Terlaksananya Penatausahaan pembiayaan daerah	100%
		Terlaksananya Koordinasi , fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%
		Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)	100%
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	100%
		Terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	100%
		Terlaksananya Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	100%

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah	Rp 4.824.769.163,- Rp 4.824.769.163,-

Medan, 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197308241992031001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAERAH



HALIMATUSSA'ADIAH, SE, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196605011990072001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratna Sari Pinem, SE, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
BKAD Provsu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. Ismael P. Sinaga, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA :
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

**Dr. Drs. ISMAEL P. SINAGA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001**

Medan, 2023
PIHAK PERTAMA :
**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

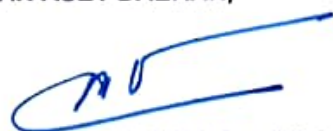
**RATNA SARI PINEM, SE, M.M
PEMBINA
NIP. 19671029 198710 2 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tepat Waktu
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tepat Waktu
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tepat Waktu
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tepat Waktu
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat Waktu
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Tepat Waktu
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	100%

NO.	KEGIATAN	JUMLAH
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 3.939.608.787,00

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH,**



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Medan, 2023
 Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
 PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**



RATNA SARI PINEM, SE, M.M
PEMBINA
NIP. 19671029 198710 2 001



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. DIAH ANANDA
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD
PROVSU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.Drs.M. ISMAEL P SINAGA, M Si
Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

PIHAK KEDUA,

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Dr Drs M ISMAEL P SINAGA, M Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG ASET
BPKAD PROVSU

Dra DIAH ANANDA
PEMBINA Tk 1
NIP. 19670724 198603 2 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Penyusunan SSH berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam Tim Penyusunan SSH.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Standar Satuan Harga pada Aplikasi E-SSH di Lingkungan Pemprov. Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Penyusunan SSH	100%
2	Terselenggaranya Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam Tim Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.	Dokumen tentang spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dalam perencanaan. Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.	42 OPD
3	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan proses laporan hasil analisa, penelaahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian dalam Tim Penyusunan RKBMD.	Buku Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Surat Persetujuan Gubernur tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Tahun Anggaran 2023. Surat Persetujuan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah TA. 2023.	42 OPD
4	Terselenggaranya Inventarisasi terhadap data Barang Milik Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42 OPD
5	Terselenggaranya pengawasan/pembinaan /sosialisasi /bimbinga teknis terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah serta melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	33 Kab/Kota
6	Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah serta pemantauan/pembinaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap temuan terkait Barang Milik Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data pencatatan pengadaan barang/jasa tahun berjalan, kapitalisasi, penyusutan, mutasi tambah kurang, hasil inventarisasi serta hibah serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3024 Data

7	Terselenggaranya sosialisasi/bimbingan teknis/coaching clinic terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah kepada Aparatur Pengelola Barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Barang Milik Daerah pada SKPD Pemprov	Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis /coaching clinic peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemantauan/pembinaan dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah Pemprov	2	Kali
8	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemprov Semester I dan Semester II Tahun 2022	Jumlah laporan Barang Milik Daerah Semester I dan Semester II dalam rangka pembinaan/pemantauan/ evaluasi dan verifikasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	42	SKPD
9	Terselenggaranya rekonsiliasi data aset tetap dan barang persediaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jumlah data realisasi belanja modal atau barang/jasa, mutasi tambah kurang, penghapusan, hibah aset tetap dan barang persediaan pada SKPD di lingkungan Pemprov	3024	Data
10	Terselenggaranya Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1	Regulasi
11	Terselenggaranya Analisis, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kesesuaian dalam Menganalisis, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	Kegiatan
		Jumlah Dokumen laporan hasil Penetapan SK Gubsu/ Sekdaprovu tentang persetujuan penetapan dan pemanfaatan BMD SK Tim dalam rangka Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan BMD.	42	SKPD
12	Terselenggaranya Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42	Laporan
13	Terselenggaranya koordinasi, pengkajian dan konsultasi Penilaian Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	Ketepatan dalam koordinasi, pengkajian dan konsultasi Penilaian Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	42	Laporan

Kegiatan

Jumlah

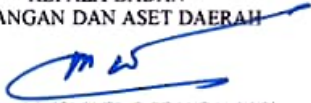
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Rp.	702,051,750
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp.	385,850,118
3	Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD	Rp.	145,455,600
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp.	354,610,000
5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	129,458,500
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp.	1,131,378,520
7	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	129,293,000

8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp.	549,907,800
9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp.	303,570,000
10	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	192,050,000
11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp.	806,857,750
12	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp.	1,759,718,500
13	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp.	765,123,900
JUMLAH			Rp. 7,355,325,438

Medan, 2023

PIHAK KEDUA :

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Dr. Drs. M. ISMAEL P SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

PIHAK PERTAMA :

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH



Dra. DIAH ANANDA
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670724 198603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Hendra Yudi, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
Jabatan : Kepala BKAD Provsu
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Medan,

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tepat Waktu	1 Tahun Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik. • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 33 kab./kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Perubahan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Perubahan APBD Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 33 Kab./Kota • 132 dokumen LRA dari dari 33 Kab./Kota • 450 dokumen data dari 33 Kab./Kota
	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota antara lain sinkronisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kab./Kota disesuaikan dengan prioritas nasional dan propinsi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • 33 dokumen dari 33 Kab./Kota

		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya monitoring Penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota terhadap hasil evaluasi gubernur • Tersedianya rekap data penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kab./Kota • Tersediannya rekapitulasi data LRA 	
	- Asistensi Pengelolaan Kab./Kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara atas Evaluasi APBD, dan P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	• 24 Kegiatan dari 36 Kegiatan
	- Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	• Persentase Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara atas Evaluasi APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	• 6 Kegiatan dari 12 Kegiatan

Kegiatan

	<u>Anggaran</u>
1. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Rp. 417.000.000,00
2. Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab./Kota	Rp. 706.014.040,00
3. Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota	Rp. 324.106.000,00
4. Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota	Rp. 381.859.000,00
5. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota	<u>Rp. 185.663.200,00</u>
Jumlah.....	Rp.2.014.642.240,00

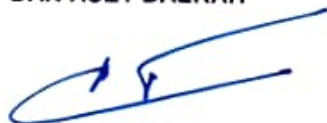
Medan,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

**KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19730824 199203 1 001**



**Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 19670818 199401 1 002**